



UPAYA DIPLOMASI UNTUK MENGURANGI DAMPAK KEBIJAKAN TARIF AMERIKA SERIKAT

Sita Hidriyah*

Abstrak

Pada April 2025, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai upaya untuk menunda rencana kenaikan tarif impor oleh AS. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi yang dapat ditempuh Indonesia untuk merespons kebijakan tarif AS. Negosiasi itu mencerminkan kepentingan kedua negara. Negosiasi tidak hanya membahas tarif, tetapi juga kepentingan ekonomi dan geopolitik jangka panjang bagi kedua negara. Dalam mendukung langkah tersebut, Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap delegasi dan optimistis bahwa negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia. Komisi I DPR RI juga mendorong para pemangku kepentingan untuk menjadikan hasil negosiasi sebagai dasar evaluasi dan wacana dalam pengambilan kebijakan ke depan. Tim negosiasi diharapkan mampu mendorong pemerintah AS untuk mempertimbangkan penerapan tarif resiprokal yang lebih adil bagi Indonesia. Strategi alternatif tentunya diperlukan dalam mengurangi dampak kebijakan guna mengantisipasi hasil negosiasi yang tidak sesuai dan menyusun kebijakan ekonomi baru bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Pada pertengahan April 2025, pemerintah Indonesia mengutus delegasi ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi dengan pejabat pemerintah AS. Pengiriman delegasi yang terdiri dari beberapa menteri tersebut merupakan respons atas kebijakan AS yang menaikkan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk ekspor Indonesia. Diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, delegasi ini bertujuan untuk melakukan lobi intensif guna menurunkan tarif impor yang dinilai memberatkan. Selain menegosiasikan tarif, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi sebagai bentuk *goodwill* dan upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara (Putra, 2025).

Negosiasi yang dilakukan sangat penting bagi perekonomian nasional karena kebijakan tarif impor berpotensi menimbulkan dampak signifikan. Tarif yang tinggi ini akan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, terutama pada sektor padat karya yang menjadi andalan ekspor dan menyerap jutaan tenaga kerja. Penurunan permintaan dari pasar AS dapat mengganggu neraca perdagangan nasional dan berisiko memicu pemutusan

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id.

hubungan kerja serta menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada 2025 ditargetkan mencapai 5,2 persen. Tulisan ini akan menganalisa strategi diplomasi yang dapat ditempuh Indonesia sebagai langkah menanggapi kebijakan tarif AS agar tidak memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional.

Upaya Negosiasi Indonesia

Dalam menanggapi permasalahan kenaikan tarif, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya melalui negosiasi. Negosiasi sebagai alat diplomasi ekonomi tersebut masih dalam proses tahap awal yang akan mulai diterapkan menjadi Juli 2025. Adapun pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara delegasi Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika (United States Trade Representative/USTR), dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari sejak tanggal 18 April 2025. USTR merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah AS sebagai negosiator untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia (Nugraha, 2025).

Delegasi Indonesia sebelumnya telah memberikan surat resmi yang diajukan pada tanggal 7 dan 9 April 2025 kepada pemerintah AS. Respons positif diperoleh setelah pihak AS menilai jika surat tersebut dinilai komprehensif dan aktif sebagai salah satu *first mover* dalam bernegosiasi bilateral dimana AS memasuki era pemerintahan yang baru di bawah Presiden Donald Trump. Sebagai bentuk kelanjutan dialog, kedua negara menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA) atau perjanjian kerahasiaan yang bersifat mengikat secara hukum di antara kedua pihak. Hal ini dapat diartikan jika materi pembahasan yang dilakukan hanya diketahui untuk dua belah pihak yang tidak diinformasikan ke masyarakat atau pihak lain demi menjaga kerahasiaan serta kestabilan proses negosiasi (“Indonesia Tawarkan”, 2025).

Terdapat lima poin utama kesepakatan strategis yang dirumuskan dalam pertemuan. Adapun poin tersebut di antaranya (“Indonesia Tawarkan”, 2025): *Pertama*, penyesuaian tarif impor. Indonesia akan melakukan penyesuaian tarif terhadap sejumlah produk asal AS secara selektif sebagai tindakan timbal balik. *Kedua*, peningkatan impor strategis. Pemerintah RI menyatakan kesediaan meningkatkan impor dari AS, khususnya komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti migas, mesin industri, dan hasil pertanian. *Ketiga*, reformasi fiskal dan kepabeanaan, yaitu Indonesia berkomitmen memperkuat transparansi melalui reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanaan. *Keempat*, penyesuaian kebijakan non-tarif. Pemerintah akan meninjau kembali aturan-aturan seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, dan prosedur lintas kementerian untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha global. *Kelima*, perlindungan dari banjir impor, dimana pemerintah akan mengaktifkan skema *trade remedies* untuk melindungi industri dalam negeri dari potensi banjir produk impor. Beberapa potensi kerja sama strategis juga dihasilkan seperti komitmen investasi perusahaan, negosiasi pada isu *critical minerals*, peluang kerja sama sains dan pendidikan, serta terbukanya ruang diskusi lanjutan bagi kerja sama teknologi dan ekosistem digital.

Dari lima poin tersebut, pandangan terhadap negosiasi tarif AS terhadap Indonesia umumnya mencerminkan kepentingan kedua belah pihak. AS ingin melindungi industrinya dan menekan defisit perdagangannya, sementara Indonesia ingin mempertahankan akses pasar dan mendorong ekspornya. Sehingga, negosiasi yang dilakukan semata-mata bukan saja soal tarif, tetapi mencerminkan peta kepentingan ekonomi dan geopolitik jangka panjang bagi kedua negara. Ini terbukti dengan pertemuan yang tidak hanya membahas tarif tetapi juga potensi kerja sama. Pertemuan ini juga membuka peluang untuk bergerak cepat membahas komitmen investasi serta diskusi kerja sama bidang lainnya. Terlebih lagi, keseriusan dalam bernegosiasi ini akan menunjukkan pada masyarakat dalam menilai kinerja berdasarkan sejauh mana pemerintah bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan publik. Sehingga nantinya dapat berimplikasi bahwa upaya ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mempengaruhi persepsi politik dan sosial masyarakat walaupun akan dilihat kembali bagaimana keefektifan negosiasi tersebut.

Strategi Alternatif Menghadapi Tarif AS

Dalam upaya negosiasi, pemerintah perlu bersiap jika banyak pihak mempertanyakan efektivitas negosiasi Indonesia terhadap AS. Oleh karena itu, strategi alternatif lain juga perlu dipertimbangkan. Jika pemerintah sudah menegosiasikan meminta tarif resiprokal diturunkan, pemerintah perlu fokus memperkuat pasar di tanah air dan tidak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya prematur dalam merespons kebijakan tarif impor AS. Langkah lainnya dapat melihat pada negara Vietnam yang mengajak pelaku usaha di Vietnam untuk aktif menjelajahi pasar internasional lainnya guna mengatasi dampak dari tarif impor yang dikenakan oleh AS. Selain itu, Perdana Menteri Vietnam juga melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah struktur ekonomi menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya sains, teknologi, dan inovasi (Daniswari, 2025).

Di samping mencari strategi lain, langkah negosiasi didukung oleh legislator. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah (Parlementaria, 2025). Ia menilai penundaan tarif terhadap produk Indonesia memberikan ruang, namun harus direspons dengan langkah konkret. Apalagi, dalam tensi perang dagang yang kian tinggi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi tujuan alternatif investasi dan ekspor, terutama dari negara-negara yang diprediksi akan terdampak lebih besar seperti Vietnam, China, hingga Thailand. Dalam proses negosiasi, Charles menilai pemerintah perlu menyusun skema negosiasi yang seimbang. Salah satunya dengan mempertimbangkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis seperti kedelai, LPG, dan produk pangan. Selain itu, anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Novanto mengungkapkan keoptimisan negosiasi tarif impor yang akan berhasil, dimana AS dapat mempertimbangkan penerapan tarif resiprokal pada Indonesia sehingga memberikan tarif yang lebih sesuai dengan Indonesia.

Kebijakan AS tampaknya menjadi ujian besar bagi pemerintah. Saat berlakunya tarif baru, gejolak nilai tukar bukan lagi menjadi ancaman. Di satu sisi, tarif bertujuan melindungi industri domestik, tetapi di sisi lain, kebijakan ini berisiko memicu inflasi dan resesi. Goldman Sachs memprediksi kemungkinan resesi AS meningkat menjadi 45 persen dalam 12 bulan ke depan akibat kenaikan biaya produksi dan gangguan rantai pasok (Sidik & Intan, 2025). Untuk menghindari hal tersebut, momentum ini menjadi ujian untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis pasar domestik dan diversifikasi ekspor. Kebijakan tarif ini menegaskan bahwa kebijakan perdagangan tak hanya tentang angka, tetapi juga tentang keseimbangan geopolitik dan keberlanjutan ekonomi. Efektivitas negosiasi dapat saja berpengaruh besar karena pemerintah telah melakukan upaya terbaiknya melalui pembahasan lebih awal. Namun di sisi lain, progresnya perlu dipantau, sehingga pemerintah dapat mempersiapkan upaya lain yang tepat guna mengantisipasi akan gagalnya hasil negosiasi yang tidak diinginkan. Walaupun respons dan apresiasi positif diperoleh, Indonesia perlu mewaspadaai apabila perlakuan tersebut tidak menjadi jaminan jika AS meloloskan negosiasi yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu diingatkan untuk tetap dapat menyusun kebijakan ekonomi yang seimbang. Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat guna menghadapi dampak yang lebih hebat, jika AS tidak menyetujui penurunan tarif yang tengah dinegosiasikan.

Penutup

Negosiasi kebijakan tarif antara Indonesia dan AS merupakan bagian penting dari hubungan dagang bilateral. Negosiasi yang dilakukan sebenarnya bersifat saling menekan tetapi tetap menghormati satu sama lainnya. Inilah yang menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Indonesia sudah dikenal memiliki strategi diplomasi yang kuat, sehingga efektivitas negosiasi dinilai mampu mengatasi perubahan tarif oleh AS. Di sisi lain, Indonesia harus menyiapkan diri jika hasil negosiasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagai strategi alternatif lain, pemerintah dapat fokus memperkuat pasar di tanah air serta melihat upaya negara lainnya sebagai pertimbangan. Selain itu, pemerintah dapat menyusun skema negosiasi yang seimbang serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis pasar domestik dan diversifikasi ekspor.

Untuk mencegah terjadinya kenaikan tarif oleh AS terhadap produk ekspor Indonesia, saat ini diperlukan strategi diplomasi dan ekonomi yang terintegrasi dan proaktif. Oleh karena itu, Komisi I perlu berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI untuk mendorong pemerintah agar lebih fleksibel dan responsif dalam merumuskan strategi negosiasi tarif.

Referensi

- Adhi, I. S. (2025, April 20). Ini 10 poin hasil negosiasi Indonesia dengan tarif Trump dari AS, apa saja? *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/21/050000765/ini-10-poin-hasil-negosiasi-indonesia-dengan-tarif-trump-dari-as-apa-saja?page=all>
- Daniswari, D. (2025, April 7). Vietnam siapkan strategi ekspor baru hadapi tarif impor AS, perluas pasar. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/04/07/215232588/vietnam-siapkan-strategi-ekspor-baru-hadapi-tarif-impor-as?page=all>
- Djumena, E. (2025, April 28). Negosiasi tarif, RI-AS tandatangani perjanjian kerahasiaan. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/04/28/164100126/negosiasi-tarif-ri-as-tandatangani-perjanjian-kerahasiaan>
- Indonesia tawarkan ke AS tarif perdagangan yang adil dan seimbang. (2025, Mei 1). *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9275/indonesia-tawarkan-ke-as-tarif-perdagangan-yang-adil-dan-seimbang?lang=1>
- Nugraha, D. W. (2025, April 26). Indonesia masuki fase negosiasi teknis dengan AS soal tarif Trump. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-memulai-fase-negosiasi-teknis-dengan-as-soal-tarif-trump>
- Putra, A. K. (2025, April 15). Kebijakan tarif resiprokal Trump: Antara proteksionisme dan dampak global. BBS EBC Malang. <https://binus.ac.id/malang/ebc/kebijakan-tarif-resiprokal-trump-antara-proteksionisme-dan-dampak-global/>
- Sidik, B. & Intan, N (2025, April 14). Tarif Trump, kebijakan kontradiktif dari semangat "Make America Great Again". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/tarif-trump-kebijakan-kontradiktif-dari-semangat-make-america-great-again>
- Y, A. L., & Ariyani, R. (2025, April 27). Sederet perkembangan negosiasi Indonesia dengan AS. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perkembangan-negosiasi-indonesia-dengan-as-1267379>

